



YOGYA LOLOS SANKSI PEMANGKASAN DAU

Dampak Penurunan Pendapatan Mulai Dirasakan

YOGYA (KR) - Dampak penurunan pendapatan dalam neraca APBD Kota Yogya 2020 mulai dirasakan. Salah satunya tertunda atau batalnya berbagai kegiatan yang sempat diusulkan dalam musrenbang untuk digulirkan tahun ini. Diperkirakan penundaan kegiatan anggaran akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan rasionalisasi APBD tahun ini merupakan amanah dari Pemerintah Pusat. "Kita diminta agar belanja modal maupun belanja barang dan jasa ditekan sampai minimal 50 persen untuk tanggap darurat Covid-19. Itu langsung kami lakukan sampai tiga kali rasionalisasi," jelasnya, Senin (4/5).

Dari hasil rasionalisasi, belanja barang dan jasa hanya bisa ditekan hingga 35 persen. Hal ini karena sisa anggaran harus dialokasikan untuk kebutuhan dasar yang sudah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, porsi belanja modal dapat ditekan hingga

di atas 50 persen. Total anggaran yang sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 175 miliar. Neraca APBD Kota Yogya 2020 yang awalnya di atas Rp 1,8 triliun, kini berkurang menjadi Rp 1,6 triliun.

Heroe menjelaskan, dari rasionalisasi anggaran itu juga sudah memangkas kegiatan di masyarakat. Hal itu pun juga dibareng dengan tergerusnya pendapatan yang diprediksi mencapai Rp 330 miliar hingga 3 Juni mendatang. "Makanya banyak kegiatan dalam musrenbang yang terpaksa dibatalkan atau setidaknya ditunda. Jika sampai 30 Juni kondisinya masih seperti ini maka pendap-

atan yang akan tergerus otomatis akan semakin banyak," imbuhnya.

Mayoritas pendapatan yang berkurang ialah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi. Penurunan PAD bisa mencapai 30 persen. Selain itu dana perimbangan juga berkurang hingga 12 persen, serta pendapatan lain-lain yang sah turun 17 persen. Meski demikian, berkat konsistensi Pemkot dalam melakukan rasionalisasi anggaran tersebut berbuah pada lolosnya sanksi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Bulan ini, DAU yang akan dicairkan ke daerah mencapai sekitar Rp 50 miliar. Pemkot Yogya akan menerima secara utuh. Sedangkan daerah lain yang dinilai kurang serius, akan dipangkas 35 persen. "Kita bersyukur tidak akan dipangkas. Bagi daerah yang dipangkas, masih harus memperbaiki neracanya," tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Pembuku-

an dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Santoso, menjelaskan penerimaan pajak daerah sepanjang April lalu sudah ada penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Dari 10 jenis pajak daerah, sampai April terealisasi 26,71 persen. Padahal tahun lalu berada di angka 30,44 persen.

Khusus pada April tahun 2019 lalu, total pajak daerah yang terpungut mencapai Rp 38 miliar. Sementara April tahun ini hanya Rp 18 miliar. Sektor yang paling terdampak ialah hotel, jika tahun lalu di bulan yang sama pajaknya mencapai Rp 11,8 miliar, tahun ini hanya Rp 3,4 miliar. Begitu pula pajak daerah lainnya yang mayoritas berkurang drastis. Satu-satunya pajak daerah yang realisasinya lebih tinggi meski tidak signifikan ialah pajak penerangan jalan. April tahun lalu Rp 4,1 miliar, sedangkan tahun ini Rp 4,3 miliar. (Dhu)-d

Instansi	
1.	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005